

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 2 menjelaskan bahwa salah satu dari kewajiban masyarakat desa yaitu mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram di desa serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting dengan maksud untuk membantu melancarkan pembangunan yang telah direncanakan dan disusun oleh Pemerintah desa dan masyarakat desa, sehingga pada proses pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Pemerintah yaitu demi terciptanya pembangunan yang partisipatif.

Dalam hal ini peran masyarakat untuk keterlibatannya dimulai dari unsur yang terkecil yaitu, RT atau RW, Dukuh, Desa atau kelurahan, kecamatan sampai kabupaten kota. Masyarakat dilibatkan dalam pembangunan yang dilaksanakan di wilayah melalui Musrenbang. Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan semua unsur warga. Musrenbang merupakan salah satu cara perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, hal ini bertujuan untuk menggali semua data dan informasi yang dibutuhkan seperti masalah yang kerap kali dihadapi, kebutuhan masyarakat dan potensi internal. Masyarakat dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan semua masalah yang

mereka hadapi terkait dengan pembangunan di daerah mereka masing-masing. Musrenbang juga adalah salah satu cara bersama untuk memastikan bahwa rencana pembangunan tersebut disusun dan dirumuskan agar dapat diterima oleh semua pihak. Memberikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan memutuskan keputusan alternatif merupakan satu langkah untuk menjadikan rencana sebagai kepemilikan bersama. Sehingga melanggar sebuah 'rencana' secara tidak langsung berarti sebagai kepemilikan bersama. Sehingga melanggar 'rencana' berarti menentang kesepakatan masyarakat, bukan terbatas menentang keputusan dari pemerintah (Haeruman, 2004: 42).

Partisipasi masyarakat menjadi dasar modal utama pada setiap perencanaan pembangunan, akan tetapi pada pelaksanaannya seringkali dilakukan dengan rekayasa gerakan. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh peran *stakeholder*, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Tidak sedikit program pemerintah dalam pembangunan yang menggunakan pola pendekatan partisipatif, namun dalam prakteknya bukan bentuk partisipasi tetapi lebih kepada mobilisasi dan juga prosesnya bukan *bottom-up* tetapi *top down*. Seringkali masyarakat dipaksa tanpa adanya dorongan dari hati nurani untuk ikut berpartisipasi dalam program yang manfaatnya sedikit bagi masyarakat dengan dalih mengatasnamakan partisipasi (Kelly, 2001).

Beberapa kasus musrenbang seperti di Kecamatan Tumpaan, Minahasa Selatan dan di Desa Monokerto, Sleman, menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan masih sangat minim dan kerap kali dimanipulasi demi kepentingan-kepentingan tertentu. Maka tidak mengherankan jika partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan desa hanya sebatas *legal standing* (Setiawan, 2005:8). Hal ini pula yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menurun. Situasi tersebut tentu akan menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif.

Jika melihat kasus di atas, sekalipun secara formal dalam perencanaan pembangunan sudah menggunakan pendekatan dengan melibatkan masyarakat, namun ternyata tidak menjadi jaminan bahwa aspirasi dari desa atau kelurahan didengar. Begitu halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender. Dimana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan, yang pada tahap itu pun masih banyak perencanaan belum terlaksana dengan baik.

Hal berbeda terjadi di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Tingkat partisipasi elemen-elemen masyarakat di Desa ini dalam kegiatan perencanaan pembangunannya relatif tinggi. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang turut berpartisipasi dalam musrenbangdes yakni pada tahun 2013 (30 orang), 2014 (32 orang), 2015 (70 orang) dan 2016 (68 orang). Selain jumlah peserta di tahun-tahun tersebut relatif tinggi, keterwakilan unsur LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) seperti PKK, Karang Taruna, RT, tokoh masyarakat dan LPMD lengkap dan cukup aktif. Salah satu bukti berfungsinya kegiatan musrenbang sebagai alat penampung aspirasi masyarakat yang

efektif di Desa Guwosari adalah ditelurkannya banyak program kerja seperti usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial. Usulan program yang diajukan melalui musrembang ini juga telah mengantarkan Karang Taruna Desa Guwosari sebagai juara Karang Taruna Berprestasi tingkat Nasional.

Melihat fakta diatas, peneliti berargumen bahwa partisipasi masyarakat di Desa Guwosari yang diejawantahkan melalui musrembangdes terbilang tinggi. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Guwosari dan faktor yang mempegaruhi partisipasinya. Alasan lain yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian di Desa Guwosari, Bantul dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menduduki tingkat pertama pada tahun 2015 di Kabupaten Bantul. Desa Guwosari menjadi desa berprestasi dengan mengirimkan LKD nya menjadi Juara Lomba Karang Taruna tingkat Kab.Bantul dan Tingkat Nasional pada Tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam musrebangdes Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsi bagi pengemban ilmu pengetahuan pada umumnya, dan dapat dijadikan sebagai referensi-referensi penelitian guna meningkatkan khasanah keilmuan atau kajian yang berkaitan dengan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi *stakeholders*, terutama Pemerintah guna melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain dari pada itu diharapkan penelitian ini akan mendapatkan informasi ilmiah mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

1.5 Literatur Review

Mengacu pada berbagai literatur pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini, literatur yang berhubungan dengan penelitian antara lain sebagai berikut:

Aris Tri Cahyo Purnomo (2016) dalam laporan penelitian akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Di desa Limbasari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga” hasil penelitian menunjukkan

bahwa perencanaan yang kurang optimal, itu di akibatkan oleh kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap desa wisata Limbasari terhadap desa wisata. Selain itu masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan perencanaan pembangunan desa hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu infrastruktur di desa Limbasai juga kurang untuk menjadi sebuah desa wisata.

Dea Deviyanti (2013) dalam laporan penelitian akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah” hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Karang Jati belumlah optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat di dalam perencanaan tersebut. Realisasi pembangunan itu sendiri dilaksanakan oleh pihak pemerintah setempat tanpa adanya swadaya dari masyarakat terutama dalam bentuk materi (dana), pemanfaatan pembangunan dapat dilihat dari hasil pembangunan yang ada di kelurahan karang jati ini sudah banyak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. Dan masyarakat juga ikut terlibat dalam mengawasi dan menilai hasil pembangunan tersebut. Selain itu untuk faktor yang mendukung masyarakat sebenarnya berada pada kemauan dari masyarakat itu sendiri, Sedangkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif di Kelurahan Karang Jati masih dihadapkan oleh berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pihak pemerintah, pengetahuan masyarakat yang masih terbatas mengenai peran serta mereka dalam pembangunan dan ketersediaan waktu

yang kurang untuk bisa ikut serta dalam kegiatan pembangunan karena adanya faktor kesibukan pekerjaan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat.

Posta Arwanto dalam laporan akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016” Dalam penelitian ini masih banyak ditemukan berbagai permasalahan salah satunya yang paling penting mencolok adalah belum adanya aktivitas transparansi keuangan dari pemerintah ke masyarakat. Salah satu contoh adalah belum adanya papan informasi dan baliho terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Selain itu permasalahan juga terdapat pada keterlambatan penyusunan pertanggung jawaban realisasi anggaran. Ini terjadi karena adanya ketidakpahaman dari tim pelaksana kegiatan. Hal ini terjadi karena belum adanya system keuangan desa (SISKUEDES) sehingga program yang seharusnya dilaksanakan belum terlaksana.

Rahma Dian Puspitasari dalam skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016”. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan dalam pembangunan yaitu partisipasi masyarakat Desa Wayang dalam berswadaya masih sangat kurang. Selain itu, sesuai dengan pernyataan dari Pemerintah Desa Wayang yang menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa Wayang sebenarnya mau untuk diajak berpartisipasi dalam hal swadaya/gotongroyong, permasalahannya ialah ada satu Dukuh

yang sulit diajak bergotong-royong bersama dan disisi lain dua Dukuh lainnya aktif pada saat diajak bergotong-royong. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat pada saat proses pelaksanaan pembangunan, satu Dukuh yang dikatakan kurang aktif tersebut lebih sedikit masyarakatnya yang hadir pada saat pelaksanaan pembangunan dibandingkan dua Dukuh lainnya yang lebih banyak masyarakatnya yang hadir untuk ikut bergotong royong/swadaya.

Dalam laporan penelitian Akadun (2011) dengan judul “Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah” menjelaskan bahwa adanya pengaruh implementasi kebijakan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu perencanaan pembangunan secara signifikan. Walaupun pengaruhnya hanya mencapai angka 29,92%, akan tetapi ini mengindikasikan bahwa peranan partisipasi terhadap mutu perencanaan pembangunan sangatlah penting. Dalam sudut pandang lain masih adanya beberapa kelemahan dalam proses partisipasi perencanaan pembangunan, terutama disebabkan karena usulan program atau proyek masyarakat melalui musrenbang tidak memiliki kepastian akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah melalui tahapan legislasi antara instansi pemerintahan dengan DPRD.

Dalam penelitian ini menjelaskan kelemahan tingkat partisipasi dalam faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal menjelaskan bahwa adanya kelemahan dalam kapasitas masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan. Hal ini

disebabkan karena model partisipasi masyarakat yang selalu memberikan penekanan terhadap model politis dan administratif, disisi lain perangkat hukum belum memberikan pola mekanisme dan kerangka bagaimana partisipasi masyarakat itu berlangsung. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan model partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan model pemberdayaan masyarakat dalam setiap perangkat hukum harus memuat proses.

Menurut Faturrahman Fadil (2013) dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Tengah” partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi titik fokus perhatian dalam meningkatkan pembangunan dan menangani berbagai masalah di Kelurahan Kotabaru Tengah. Hal yang mendasar bagi masyarakat yaitu apakah partisipasi masyarakat tersebut telah sesuai dan dapat menjadi pemecah masalah yang berbuah solusi dalam menangani permasalahan yang ada, serta merencanakan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Pelaksanaan Musrenbangkel merujuk pada pedoman yang telah sesuai pada sasaran yang ditetapkan dimana dalam pelaksanaannya terbuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan saran atau usulan perencanaan pembangunan di kelurahan melalui tokoh-tokoh masyarakat.

Menurut Stepanus Henry (2013) dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda “ secara keseluruhan yaitu partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang dalam pembangunan fisik seperti pembangunan dalam pembangunan sarana pendidikan yang

keterlibatan masyarakat sudah terlibat secara langsung dalam perbaikan sektor pendidikan, adapun dalam penyampaian aspirasi masyarakatnya ikut terlibat langsung dan dalam pembangunan sarana kesehatan masyarakatnya terlihat antusias dalam mengikuti setiap program-program pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik seperti menyumbangkan gagasan dan pemikiran pun masyarakat ikut berperan aktif dalam memberikan masukan atau saran dalam setiap forum musyawarah masyarakat setempat.

Menurut Nuring Septyasa Laksana (2016) dalam jurnal yang berjudul “Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul” untuk terciptanya *good governance* membutuhkan keseriusan pemerintah, salah satu faktor yang wajib dipenuhi yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan program-program pemerintah. Hal ini akan mendorong pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan baik ditingkat nasional maupun tingkatan daerah. Di Desa tersebut melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melahirkan Visi menuju Indonesia yang lebih Sehat demi peningkatan kesehatan masyarakat yang optimal dan mewujudkan program Desa Siaga. Dalam pelaksanaan program Desa Siaga tentunya dibutuhkan partisipasi masyarakat didalamnya yang dapat mengurangi angka kematian Ibu dan Bayi dan tercapainya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.

Menurut Teraik Kogoyo (2015) dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya Papua” penelitian ini menggunakan tiga kategori untuk mengukur tingkat partisipasi yaitu partisipasi masyarakat tingkat tinggi, partisipasi masyarakat tingkat rendah dan partisipasi masyarakat tingkat sedang. Tahapan ini dimulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dapat dilihat dari keaktifan pemeliharaan. Menyatakan bahwa karakteristik desa dapat dilihat melalui peninjauan dari aspek sosial budaya, ekonomi dan letak geografis serta tingkat pendidikan masyarakat yang memiliki korelasi terhadap keterlibatan tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Menurut Adam Latif dan Muhammad Rusdi (2019) dalam jurnal yang berjudul “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang” menjelaskan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidenreng termasuk dalam kategori baik dengan jumlah persentase 78,65%. Indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat musrenbang. Partisipasi menjadi instrumen yang paling penting memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat terus berkembang sesuai dengan potensinya, aktif terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari program dan kebijakan yang telah digagas oleh Pemerintah.

Tabel 1.1 Literatur Riview

No.	Nama Penulis	Judul	Konten
1.	Ari Tri Cahyo Purnomo, 2016	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata di	Partisipasi dalam hal perencanaan belum optimal, dikarenakan masih minimnya pemahaman pada sebagian masyarakat

		Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.	terhadap Desa wisata Limbasari, selain itu masih banyak warga yang berpendapat bahwa yang melakukan tahapan perencanaan hanya dilakukan oleh pemerinrah desa saja sehingga mengakibatkan masyarakat banyang yang tidak ikut terlibat dalam tahapan perencanaan.
2.	Dea Deviyanti, 2013	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan seluruh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri dilakukan oleh pemerintah setempat tanpa adanya swadaya dari masyarakat terutama dalam bentuk materi atau pendanaan. Selain itu

			untuk faktor yang mendorong masyarakat sebetulnya terletak pada kesadaran dan kemauan dari masyarakat itu sendiri.
3.	Posta Arwanto, 2016	Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam mengelola Keuangan Desa Bangunjiwo dan Desa Ngetisharjo Kecamatan Kasihan, Bantul, Provinsi DIY Tahun 2016.	Ditemukan berbagai permasalahan salah satunya yang paling penting adalah belum adanya aktivitas transparansi keuangan dari pemerintah kepada masyarakat setempat. Salah satunya tidak ditemukan papan informasi atau baligho terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa. Selain itu juga ditemukan terdapat pada keterlambatan penyusunan pertanggung jawaban realisasi anggaran.
4.	Rahma Dian Puspitasari,	Partisipasi Masyarakat Dalam	Partisipasi masyarakat di Desa Wayang masih

	2016	Pelaksanaan Pembangunan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016	sangat kurang, hal ini dikarenakan dari Pemerintah Desa Wayang yang menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa wayang sebenarnya mau untuk diajak berpartisipasi dalam hal gotongroyong atau swadaya, akar permasalahannya ada satu Dukuh yang sulit untuk diajak bersinergi dan ini berdampak pada masyarakat yang lain.
5.	Akadun, 2011	Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya pengaruh implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu perencanaan pembangunan secara signifikan, walaupun

			<p>pengaruhnya hanya mencapai angka 29,92% akan tetapi hal ini menandakan bahwa peran partisipasi pada kualitas tahapan perencanaan pembangunan sangat penting.</p>
6.	Faturrahman Fadil, 2013	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tengah.	<p>Dalam perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan titik fokus perhatian dalam meningkatkan kualitas pembangunan, hal yang mendasar untuk masyarakat yaitu apakah partisipasi masyarakat tersebut sudah sesuai dan dapat menjadi pemecah masalah yang berbuah solusi untuk menangani permasalahan yang ada, serta merencanakan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.</p>

7.	Stepanus Henry, 2013	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungan Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda	Partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan secara keseluruhan di Kelurahan Sungai Keledang dalam pembangunan fisik seperti pembangunan dalam pembangunan sarana pendidikan keterlibatan masyarakat sudah terlibat secara langsung dan ikut serta aktif untuk kemajuan serta perbaikan pada bidang pendidikan.
8.	Nuring Septyasa Laksana, 2016	Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul.	Adanya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor untuk terciptanya “ <i>Good governance</i> ”, terutama keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan program-program pemerintah. Hal ini akan mendorong instansi pemerintah dalam mewujudkan

			tujuan-tujuan pembangunan baik itu diwilayah tingkatan lokal atau daerah maupun nasional.
9.	Teraik Kogoyo, 2015	Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya Papua	Ada 3 (tiga) kategori yang menjadi tolak ukur untuk mengukur tingkat partisipasi, yaitu partisipasi masyarakat tingkat tinggi, partisipasi masyarakat tingkat rendah dan partisipasi masyarakat tingkat sedang. Tahapan ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.
10.	Adam Latif dan Muhammad Rusdi, 2019	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng	Partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidenreng termasuk dalam kategori baik dengan jumlah persentase 78,65%. dalam tahapan partisipasi persentase tersebut sudah dapat menunjukkan

		Rappang	bahwa tingkat partisipasi di Desa Timoreng Panua memiliki nilai tertinggi. pada akhirnya Partisipasi menjadi instrumen yang paling penting memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat terus berkembang sesuai dengan potensinya
--	--	---------	--

1.6 Kerangka Dasar Teori

Dalam penelitian ini tentang Partisipasi masyarakat dalam dalam perencanaan pembangunan Desa Guwosari menggunakan dua teori, yakni Partisipasi dan Pembangunan Desa.

1.6.1 Teori Partisipasi

A. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berarti peran seseorang atau kelompok dalam lapisan masyarakat untuk proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi sumbangsih pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumardi, 2010:46)

Partisipasi dikemukakan oleh (Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, 2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti sebagai pembuat keputusan menyarankan suatu kelompok atau masyarakat untuk ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Menurut Slamet (1994: 27-28) partisipasi didefinisikan sebagai keikutsertaan dalam pembuatan keputusan dan melaksanakan keputusan itu, maka bentuk partisipasi ini dapat dikatakan sebagai partisipasi aktif. Apabila mereka dalam pembangunan terbatas pada pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada mereka, maka ini dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi pasif. Siagian (1985:10) menjelaskan secara rinci bahwa partisipasi pasif merupakan sikap, perilaku dan tindakanya tidak mengakibatkan terhambatnya suatu proses kegiatan pembangunan, dan partisipasi aktif dijelaskan oleh siagian yaitu :

- a. Menunjukkan adanya rasa kesadaran pada setiap pribadi masyarakat dalam bersosial dan bernegara.
- b. Turut ikut dalam memikirkan nasib perseorangan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di lingkungan masyarakat sebagai sarana wadah untuk menyampaikan aspirasi.
- c. Taat pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Rela berkorban melakukan yang dituntut untuk pembangunan demi kepentingan masyarakat bersama.
- e. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab, contohnya seperti membayar pajak untuk kepentingan negara dan orang banyak .

Penjelasan tersebut menerangkan bahwa, ketersediaan masyarakat pada setiap anggota masyarakat untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi demi terwujudnya masa depan yang semakin baik.

Dalam beberapa referensi yang ditemukan selalu menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program pembangunan. Akan tetapi dalam pengertian substantif yang dijelaskan menurut Eko Sutoro (2004:285) menjelaskan bahwa ada tiga substansi dari partisipasi yang itu terdiri dari *voice* (suara), *Acces* (akses) dan *control* (kontrol), yaitu merupakan :

- a. *Voice* (suara) setiap warga negara memiliki hak dan ruang untuk menyampaikan suara dalam bentuk aspirasi pada setiap proses pemerintahan. Hal yang sama, sebaliknya pemerintah harus mampu mengakomodasi setiap suara yang terus berkembang dalam masyarakat yang kemudian nantinya dijadikan sebagai dasar pembuat kebijakan .
- b. *Acces* (akses) dimana setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuat kebijakan, termasuk dalam mengakses layanan publik.
- c. *Control* (kontrol) setiap warga negara atau lapisan masyarakat memiliki kesempatan dan hak untuk dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu pemerintahan, maupun dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan.

Dapat diketahui bahwa partisipasi adalah aspek yang sangat penting, karena dengan adanya partisipasi tentu masyarakat dapat menyalurkan harapan dan aspirasinya dan ikut terlibat secara langsung

dalam pembuat suatu kebijakan serta turut dalam mengawasi pelaksanaan pada setiap kebijakan pemerintah.

Hal ini tidak kemudian partisipasi bisa berkembang tumbuh dengan sendirinya hanya karena suara masyarakatnya, dibutuhkan dorongan penuh atau *support* dari pemerintah untuk selalu memberikan ruang-ruang publik yang dimana selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan.

B. Bentuk – bentuk Partisipasi

Pada tahapan partisipasi menurut Tjokomidjojo (dalam Safi'i, 2009:73) menjelaskan bahwa tahapan partisipasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu : (a) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; (c) Keterlibatan dalam memetik dan mandaat pembangunan secara berkeadilan.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi yang secara nyata dilakukan oleh masyarakat, yaitu : (Rohmad, 2016: 142-143):

- 1) Partisipasi uang, yaitu merupakan bentuk partisipasi untuk melancarkan usaha-usaha bagi suatu pencapaian kebutuhan untuk masyarakat yang memerlukan bantuan.
- 2) Partisipasi harta benda, yaitu merupakan partisipasi dalam bentuk sumbangsih harta benda, hal ini biasanya berupa alat-alat atau perkakas lainnya.
- 3) Partisipasi tenaga, yaitu merupakan partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan suatu usaha yang dapat menunjang target keberhasilan dalam program-program.

- 4) Partisipasi keterampilan, yaitu untuk memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain yang sedang membutuhkan.
- 5) Partisipasi buah pikiran, ini merupakan partisipasi sumbangan gagasan, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan untuk mewujudkan dengan memberikan suatu pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang akan diikutinya.

Hoofsteed (dalam Anwar, 2012:88) membagi partisipasi atas tiga klaster atau tingkatan yaitu :

- 1) Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkatan pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- 2) Partisipasi inisiatif (*inication participation*) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemerintah desa baik formal maupun informal ataupun tersebut merupakan bujukan kebutuhan masyarakat.
- 3) Partisipasi eksekusi (*exuation participation*) adalah partisipasi pada tahapan proses pelaksanaan.

C. Tipe Partisipasi

Menurut Dusseldrop menjelaskan bahwa (dalam Slamet, 1994: 10-13) membagi tipe partisipasi, sebagai berikut :

1. Penggolongan partisipasi berdasarkan pada Derajat Kesukarelaan. Hal ini didasari kesukarelaan yang dibagi menjadi dua yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa.

- a) Partisipasi bebas terjadi bila personalia (individu) melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif. Dalam partisipasi ini terdapat dua sub kategori yaitu :i) *Partisipasi spontan* yang dilakukan berdasarkan keyakinan sendiri tanpa adanya pengaruh dari pihak luar, dan ii) *Partisipasi terbujuk* yang dilakkan karena adanya keyakinan yang muncul ketika ada penyuluhan atau mendapat pengaruh dari pihak lain.
 - b) Partisipasi terpaksa ini terjadi dikarenakan adanya peraturan atau hukum karena keadaan faktor kondisi sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi apabila orang-orang tertentu dipaksana melalui suatu regulasi, ini dapat bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Penggolongan Partisipasi berdasarkan pada cara keterlibatan.
- a) Partisipasi langsung bila seseorang itu menampilkan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi.
 - b) Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya kepada yang mewakili.

Menurut Ericson (Slamet, 2004:89) bentuk partisipasi dalam pembangunan terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu : 1) Partisipasi dalam perencanaan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) Partisipasi dalam pemanfaatan dan menurut Cohen dan Uphoff (Dwiningrum. 2011:6) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dibedakan ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu : 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) Partisipasi dalam pemanfaatan, dan 4) Partisipasi dalam evaluasi, penjelasan sebagai berikut :

- 1) Partisipasi dalam perencanaan

Pedekatan partisipatif dalam suatu perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek dari pembangunan semata, akan tetapi ini sebagai subjek dalam proses pembangunan. Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam pencapaian tujuan tertentu (Wrihatnolo dan Nugroho. 2006:40).

Partisipasi pada tahapan ini merupakan keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Dalam hal ini masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan (Slamet, 2004:89).

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi pada tahapan ini yaitu keterlibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan tenaga dalam bentuk uang, barang atau jasa serta gagasan atau ide-ide sebagai salah satu wujud bentuk partisipasi pada kegiatan tersebut (Slamet, 2004: 90). Nilai positif dari partisipasi ini merupakan bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) yang telah selesai dikerjakan.

3) Partisipasi dalam pemanfaatan

Partisipasi pada tahapan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu program atau kegiatan tersebut ketika sudah selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini dapat berupa tenaga dan uang untuk memelihara proyek yang telah dibangun (Dwiningrum, 2011:61).

4) Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan, yang dapat di monitoring secara berkala, apakah kegiatan atau program sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum tercapai.

Jika dilihat dari penjelasan tentang jenis-jenis atau bentuk partisipasi di atas, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk partisipasi pelaksanaan yang dapat disimpulkan bahwa partisipasi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Partisipasi dalam perencanaan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam evaluasi

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi

Menurut Holil (1980:9-10) menjelaskan bahwa unsur-unsur dasar partisipasi sosial ini yang juga dapat mempengaruhi faktor partisipasi yang ada dalam masyarakat, yaitu :

- 1) Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat.
- 2) Kepercayaan diri masyarakat.
- 3) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat.
- 4) Kapasitas kemampuan dan kemampuan untuk memberikan perubahan atau rasa ingin memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan yang mandiri.
- 5) Kepentingan umum murni, setidaknya umum dalam bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang

semu karena adanya kepentingan perseorangan atau kelompok masyarakat.

- 6) Prakarsa masyarakat atau perseorangan yang diterima dan diakui oleh sebagian atau menjadi milik masyarakat.
- 7) Musyawarah untuk ketanggapan masyarakat terhadap suatu permasalahan, kebuthan-kebutuhan dan kepentingan umum.
- 8) Organisasi, keputusan rasional dan efisien.

Sedangkan menurut Anggel (1967:30) dikutip oleh Saca Firmansyah (2009) menjelaskan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

a. Pendidikan

Dalam hal pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Faktor pendidikan seringkali dianggap dapat mempengaruhi pola sikap hidup seseorang terhadap lingkungan sekitarnya, sikap ini yang perlu bagi peningkatan kesejahteraan terhadap seluruh masyarakat.

b. Usia

Faktor ini merupakan hal yang mempengaruhi sikap pribadi seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral pada norma dan nilai yang ada pada masyarakat, hal ini cenderung lebih banyak yang ikut terlibat dalam berpartisipasi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

c. Jenis kelamin

Dalam masyarakat masih kental dengan norma atau kultur bangsa yang berdalih bahwa pada hakikatnya perempuan itu hanya untuk “di dapur” bahkan ada pribahasa pada akhirnya hanya di “sumur,

dapur dan kasur” hal ini artinya bahwa dalam banyak masyarakat keterlibatan atau peran perempuan hanyalah sebatas mengurus rumah tangga, akan tetapi seiring berjalanya dan bergesernya zaman semakin lama nilai peran perempuan kini sudah mulai menalami pergeseran dengan adanya sebuah gerakan yang disebut emansipasi wanita yang tentu didalamnya menuntut hak-hak perempuan yang dapat melakukan hal-hal diluar kemampuan mengurus rumah tangga.

d. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal di daerah tertentu dan memiliki pengalaman bersosial dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada tingkatan partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan daerah tertentu, maka rasa memiliki terhadap sesama akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan yang baru menetap dalam suatu lingkungan, hal ini berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.

e. Pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan seseorang secara tidak langsung akan menentukan berapa penghasilan yang diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan baik untuk mencukupi dalam kehidupan sehari-harinya dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

1.6.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan untuk daerah pedesaan. Dwipayana (2003) menyebutkan, bahwa pemerintahan desa sangat memiliki peran yang begitu signifikan didalam pengelolaan proses sosial pada tatanan masyarakat. Tugas

paling penting yang harus diemban oleh pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan secara demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenang dan berkeadilan. Selain itu pemerintahan desa dituntut juga untuk melakukan perubahan yang radikal baik dari segi kepemimpinan dan kinerja birokrasi sehingga pemerintah desa benar-benar memberikan pelayanan berkualitas dan bermakna sehingga mengarah kepada *good governance*.

Penyelenggaraan pemerintah desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintahan desa melalui kepala desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksanaan pemerintah desa. Penyelenggaraan urusan di bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui badan permusyawaratan Desa (BPD).

1.6.3 Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan

Menurut Suryono (Henry, 2013) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat, pembangunan ini bersentuhan dengan suatu proses yang berkaitan dengan hal seperti struktur sosial, institusi nasional serta sikap dari masyarakat yang bertujuan mengejar kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan individu atau kelompok yang berkepentingan untuk saling bekerjasama, yang pada akhirnya dapat merubah pola-pola yang ada pada lapisan masyarakat.

Indikator keberhasilan pembangunan nasional dapat dilihat dari bagaimana berhasilnya pembangunan yang ada pada tingkatan desa, jika pembangunan desa diseluruh daerah di Indonesia dapat dikatakan berhasil maka secara tidak langsung akan membuat pembangunan secara nasional ikut serta dalam keberhasilan. Pembangunan desa yaitu kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotongroyong (Ardilah, 2014).

Menurut Siagan menjelaskan bahwa (dalam Safi'i 2009: 08) pembangunan adalah rangkaian usaha untuk melanjutkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana yang ditempuh oleh suatu negara menuju modern dalam rangka pembinaan bangsa. Definisi pembangunan disini mengandung beberapa ide pokok yakni :

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
2. Pembangunan ditetapkan untuk sesuatu yang dilaksanakan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana baik jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek.

Rencana pembangunan mengarah pada modernitas yang ingin dicapai mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).

3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri .
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

b. Jenis pembangunan

Dalam konteks pembangunan terdapat dua jenis pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

1. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik berupa bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum. Menurut B.S Muljana (1995: 3) menjelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan oleh rakyat dan oleh pemerintah. Pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya langsung menghasilkan barang dan jasa untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, baik rumah tangga, perorangan, dan industri. Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu pembangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai fungsi esensial sebagai peluang dan pendukung kegiatan-kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pembangunan fisik tidak dapat dilihat secara

tersendiri dan sangat erat kaitannya dengan pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik. Sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Djoko Sujarto (1985: 12) bahwa perencanaan aspek fisik akan mempunyai kaitan serta merupakan implikasi dan tindak lanjut perencanaan sosial budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Contoh beberapa proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata pembangunan segi-segi non-fisik, yaitu pembangunan sosial, sosial budaya, dan ekonomi:

- 1) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial yaitu bangunan perumahan, bangunan kesehatan, bangunan rekreasi, bangunan pemerintahan, bangunan pertemuan, bangunan olah raga, pertamanan, jaringan utilitas umum.
- 2) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial budaya yaitu bangunan sekolah, bangunan tempat ibadah, bangunan kegiatan seni budaya, bangunan musium dan sejarah.
- 3) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial ekonomi yaitu pasar dan perbelanjaan, bangunan industri, pusat perkantoran dan perdagangan, bangunan pergudangan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, terminal dan stasiun kereta api, jalan raya dan jalan kereta api.

2. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniworo, 2007 dalam Meidiani, 2013: 521). Dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang

pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisik. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu: pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Gilang Pramana, 2013: 587). Dalam hal ini Pemerintah juga membangun infrastruktur bukan fisik yang disebut infrastruktur kelembagaan, yaitu penetapan kebijakan, baik sifatnya umum, seperti kebijakan moneter, ataupun yang bersifat khusus, seperti kebijakan di bidang perdagangan ataupun di bidang ketenagakerjaan (Muljana, 1995: 3).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain :

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa yaitu tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan pemukiman masyarakat Desa, dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yaitu air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yaitu : taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai

pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yaitu pasar Desa, pembentukan dan pembangunan BUM Desa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, *cold storage* (gudang pendingin), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi bio gas, mesin pakan ternak, dan sarana dan prasarana ekonomi sesuai dengan kondisi Desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup yaitu penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Jadi menurut berbagai penjelasan para peneliti pembangunan desa dapat disimpulkan yaitu bentuk perubahan yang ada di Desa, yang meliputi seluruh aspek tata-tatanan masyarakat baik perubahan secara fisik maupun non fisik, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

1.6.4 Musrenbang Desa

Musrenbang merupakan forum musyawarah dalam tahapan perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh penyelenggara lembaga publik, yaitu pemerintah desa,

bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan yang lainya. Musrenbang memiliki asas pemahaman yang memiliki makna agar mampu membangun sinergitas antar pemangku kepentingan dan masyarakat untuk kesejahteraan Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa merupakan forum musyawarah tahunan yang dimana para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk secara bersama-sama menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun yang akan direncanakan. Pelaksanaan Musrenbang Desa dilaksanakan pada setiap bulan Januari dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Pada setiap Desa diberi amanah untuk meyusun dokumen rencana 5 (lima) tahunan yaitu RPJMD Desa serta rencana dokumen tahunan yaitu RKP Desa (PP Nomor 72 Tahun Pemerintahan Desa dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007).

Dalam pembangunan memiliki tiga komponen tata pemerintahan yang menjadi poros bergeraknya kemajuan pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Hal ini menjadikan forum Musrenbang merupakan kesempatan warga menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari tahapan paling bawah secara partisipatif. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perihal Pemerintahan Desa menjelaskan secara rinci lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah termasuk

hak dan kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004.

1.6.4.1 Tujuan dan Luaran Musrenbang Desa

1. Adanya kesepakatan prioritas kebutuhan atau masalah pada kegiatan desa yang akan menjadi dasar bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sebagai berikut.
 - a. Prioritas kegiatan desa yang dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa atau masyarakat.
 - b. Prioritas Kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana APBD kabupaten atau kota dan sumber dana lain;
 - c. Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintahan daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten atau kota atau APBD Provinsi.
2. Menyepakati Tim Delegasi desa yang akan menjelaskan pemaparan persoalan daerah yang di desanya pada proses forum Musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah atau SKPD tahun berikutnya.

Luaran Musrenbang Desa adalah :

- a. Daftar Prioritas kegiatan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) untuk perencanaan tahunan Anggaran yang akan direncanakan.

- b. Daftar Prioritas permasalahan yang ada di daerah atau desa untuk disampaikan langsung di Musrenbang Kecamatan.
- c. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan ikut terlibat langsung dalam forum Musrenbang Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, minimal 1 (satu) perempuan dan bila 5 (lima) orang minimal 2 (dua) orang perempuan.
- d. Berita Acara Musrenbang Desa.

1.6.4.2 Tahapan Pra-Musrenbang Desa

1. Terdiri atas beberapa kegiatan dalam pengorganisasian dalam Musrenbang, yaitu :
 - a. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM)
 - b. Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang)
 - c. Persiapan Teknis pelaksanaan Musrenbang desa, yaitu :
 - a) Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa
 - b) Pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada seluruh peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum hari-H).
 - c) Mengkoordinir persiapan logistik (konsimsi, alat-alat peralatan, bahan dan tempat).
2. Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - a. Kajian kondisi, permasalahan dan potensi desa (per dusun/RW dan/atau per sektor/isu pembangunan) bersama warga masyarakat.

- b. Penyusunan dana atau informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.
3. Penyusunan draf Rancangan awal RKP Desa, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - a. Pengkajian ulang (review) dokumen RPJM Desa dan hasil-hasil kajian desa oleh TPM Dan Tim pemandu.
 - b. Kajian dokumen atau data informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM dan Tim Pemandu.
 - c. Penyusunan draf Rancangan awal RKP Desa dengan mengacu pada kajian oleh TPM dan Tim Pemandu.

1.6.4.3 Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa

1. Mengawali acara dengan pembukaan yang dipandu langsung oleh pembawa acara dengan berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang Desa
 - b. Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM)
 - c. Sambutan dari kepala desa sekaligus pembukaan secara resmi
 - d. Doa bersama
2. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah :
 - a. Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan atau bidang pembangunan desa.
 - b. Pemaparan kepala desa tentang :
 - 1) Hasil evaluasi RKP Desa yang sudah berjalan
 - 2) Kerangka prioritas program menurut RPJM Desa

- 3) Informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang selanjutnya akan direncanakan,
3. Pemaparan draf Rancangan awal RKP Desa oleh TPM (Sekdes) dan tanggapan atau pengecekan (verifikasi) oleh peserta.
4. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran per bidang atau isu.
5. Musyawarah penentuan Tim Delgasi Desa.
6. Penutupan yaitu merupakan proses penandatanganan berita acara Musrenbang dan penyampaian kata penutup yang disampaikan oleh ketua TPM atau pemandu.

1.6.4.4 Tahapan Pasca-Musrenbang Desa

1. Rapat kerja tim pengurus untuk membahas hasil dari Musrenbang Desa :
 - a. Penerbitan SK Kades untuk tim delegasi Desa.
 - b. Penyusunan daftar prioritas masalah Desa untuk disampaikan di Musrenbang Kecamatan.
 - c. Penyusunan RKP Desa sampai menjadi SK Kades (Permendagri No,66/2007 dan PP No.72/2005).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

1.6.4.5 Peserta Musrenbang Desa

Dalam Musrenbang desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat individu atau kelompok yang terdiri dari :

- a. Perwakilan wilayah (Dusun/RT/RW)
- b. Perwakilan dari profesi
(Pertanian/ekonomi/kesehatan/pendidikan/lingkungan)

- c. Perwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)
- d. Perwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan kelompok marjinal)
- e. Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Peran dan tugas peserta dalam forum Musrenbang yaitu ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini memiliki artian bahwa partisipasi aktif disini bukan hanya sekedar banyak bicara, melainkan memberikan *feedback* sesuai dengan arahan dan pedoman serta menjadi peserta yang juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain, serta menjaga agar forum Musrenbang benar-benar menjadi forum Musyawarah bersama

Adapun Prinsip-prinsip sebagai peserta yang menjadi kriteria atau sebagai persyaratan yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin menjadi sebagai peserta Musrenbang, sebagai berikut :

- a. Peserta harus bersedia mempersiapkan diri dengan cara mempelajari berbagai informasi, dokumen dan materi yang relevan untuk proses pelaksanaan Musrenbang Desa. Informasi dapat diperoleh melalui sumber yang dapat dihubungi yaitu Tim Pemandu maupun Tim penyelenggara Musrenbang desa.
- b. Peserta wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, tidak mendiskriminasi tidak mendominasi dan selalu mengutamakan kepentingan umum (desa) dan keberpihakan terhadap golongan marjinal.
- c. Peserta memiliki kapasitas untuk berkontribusi membangun mengenai kebijakan, aturan, arah program pemerintah, dan

berbagai isu pembangunan. sehingga bisa berperan sebagai peserta Musrenbang yang aktif.

1.6.5 Musrenbang Dusun

Musyawarah perencanaan ditingkat warga dusun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pelaksanaan Musrenbang Desa. Hal ini untuk mendapatkan dasar ataupun bahan-bahan masukan rencana pembangunan Desa atau kelurahan secara akomodatif dan partisipatif. Musdus atau Musyawarah Dusun ini pada dasarnya hanya melaksanakan pengkajian terhadap RPJM Desa serta menginventarisir perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (*Nedd Assesment*).

Adapun maksud penyelenggaraan musyawarah dusun atau rembug warga yaitu untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas individu warga untuk terciptanya masyarakat yang mandiri, melalui keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
- b. Mendorong partisipasi dan menumbuhkan rasa kepedulian atau kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.
- c. Menciptakan rasa tanggung jawab terhadap sesama masyarakat demi terwujudnya kemajuan masyarakat bersama.

Pada dasarnya proses atau tahapan Musrenbangdus terdiri menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Tahapan Persiapan,

2. Tahapan Pelaksanaan
3. Tahapan tindak lanjut Musyawarah.

1.6.5.1 Tujuan Musrenbang Dusun

1. Mendeteksi atau mengidentifikasi potensi permasalahan di area lingkungan Dusun RT atau RW setempat yang menyangkut pada aspek bidang ekonom dan sosial budaya warga, serta sarana dan prasarana fisik lingkungan dan memberikan alternatif berbagai pemecahan permasalahan yang sifatnya solutif.
2. Menyepakati secara bersama usulan kegiatan pada prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan dalam proses tahapan pelaksanaan Forum Musrenbang Desa.
3. Menetapkan Tim Delegasi Dusun atau RW yang akan ikut terlibat dan mengikuti jalanya forum Musrenbang Desa.

1.6.5.2 Tempat dan Waktu Musrenbangdus

Musrenbangdus dilaksanakan pada bulan Januari, pelaksanaan ini paling lambat jatuh pada minggu ke 3 (tiga). Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada hari kerja maupun diluar hari kerja. Namun Musrenbangdus tidak diperkenankan melaksanakan forum Musyawarah warga pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan (Peremendesa Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1)).

Penyelenggaraan Musrenbangdus dapat dilaksanakan di tempat seperti gedung balai Desa, gedung pertemuan Desa, lapangan Desa atau gedung sekolah yang ada disekitaran Desa ataupun tempat lainya yang masih layak untuk mengadakan forum warga masyarakat dusun. Pada intinya tempat penyelenggaraan musyawarah harus berada diwilayah Desa (Peremendesa 2 /2015 Pasal 9).

1.6.5.3 Peserta Musrenbangdus

Seluruh warga berhak sebagai peserta forum musyawarah warga, dan sukurang-kurangnya peserta Musrenbangdus dihadiri oleh :

1. Kepala Desa atau aparatur pemerintah Desa (Sebagai narasumber tim monitoring)
2. Kepala Dusun atau pengurus RW
3. Perwakilan masing-masing pengurus RT
4. Anggota pemberdayaan masyarakat seperti LKM/BKM, LPMD. KPMD dan anggota relawan lainnya.
5. Perwakilan perempuan.
6. Tokoh masyarakat (Agama atau pemuka adat setempat).
7. Tokoh Pemuda (Karangtaruna)
8. Perwakilan kelompok masyarakat berbagai profesi seperti petani, pelaku usaha, pedagang, dokter atau bidan, guru dan lainnya yang ada disekitar dusun atau RW setempat.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan suatu kelompok atau secara personal dalam lapisan masyarakat untuk memberikan kontribusi atau sumbangsi dalam bentuk pemikiran, keikutsertaan merumuskan tahapan suatu kebijakan dalam perencanaan maupun pelaporan. Teori Partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli yang sesuai dengan fokus penelitian ini menurut penulis yaitu konsep partisipasi menurut Sondang P. Siagian (dalam Anwar, 2012: 85) dan Soetrisno (1995: 208). Bentuk partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah menurut Rohmad (2016: 142-143) yang terdiri dari uang, harta benda,

tenaga, keterampilan, dan buah pikiran/ide, terdapat penggabungan teori dalam partisipasi harta benda yaitu menurut Rohmad (2016: 142-143) dan Huraerah (2008: 102 dalam Laksana, 2013: 610). Untuk tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 1) Partisipasi dalam perencanaan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) Partisipasi dalam pemanfaatan, sedangkan menurut Uphoff dan Cohen dalam Dwiningrum (2011:61) bahwa partisipasi masyarakat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) Partisipasi dalam pemanfaatan, dan 4) Partisipasi dalam evaluasi.

Dalam defnisi konseptual dari partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dan sinergitas atau kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan, hal ini menjelaskan partisipasi menjadi kedalam beberapa tahapan yaitu :

1. Partisipasi dalam perencanaan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan dan;
3. Partisipasi dalam evaluasi.

Selanjutnya, bentuk lain partisipasi yang dapat disumbangsihkan yaitu uang, harta benda, gagasan atau ide, tenaga dan keterampilan lainnya.

1.7.2 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa yang dikemukakan oleh para ahli yang sesuai dengan fokus penelitian dari penulis yaitu menurut T.R Batten (1979, dalam Anwar, 2012: 83), B.S Muljana (1995: 3), dan Kuncoro (2010, dalam Meidiani, 2013: 520). Pembangunan Desa pada bangunan Desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan

masyarakat, mulai dari proses diskusi dan menentukan keinginan, merencanakan, dan mengerjakan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pada umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik (pembangunan yang dapat langsung dirasakan dan tampak oleh mata) seperti jalan, gedung sekolah, tempat ibadah, saluran irigasi, talud, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan serta kegiatan dalam masing-masing tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Guwosari.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1.8.2 Partisipasi

- a. Partisipasi dalam pengambilan perencanaan pembangunan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan
- c. Partisipasi dalam pelaporan atau evaluasi

1.8.2 Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Fisik

Menurut Djoko Sujarto (1985: 12) bahwa perencanaan aspek fisik akan mempunyai kaitan serta merupakan implikasi dan tindak lanjut perencanaan sosial budaya, ekonomi, dan

bahkan politik. Contoh beberapa proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata pembangunan segi-segi non-fisik, yaitu pembangunan sosial, sosial budaya, dan ekonomi:

- 1) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial yaitu bangunan perumahan, bangunan kesehatan, bangunan rekreasi, bangunan pemerintahan, bangunan pertemuan, bangunan olah raga, pertamanan, jaringan utilitas umum.
- 2) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial budaya yaitu bangunan sekolah, bangunan tempat ibadah, bangunan kegiatan seni, budaya, bangunan museum sejarah.
- 3) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial ekonomi yaitu pasar dan perbelanjaan, bangunan industri, pusat perkantoran dan perdagangan, bangunan pergudangan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, terminal dan stasiun kereta api, jalan raya dan jalan kereta api.

b. Pembangunan Non fisik

Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniworo, 2007 dalam Meidiani, 2013: 521). Dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau gerakan sosial. Adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik menjadi aspek yang sangat penting, contohnya

dalam hal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan bidang pendidikan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif, menurut Sukmadinata, N. S. (2007:6) metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendiskripsikan yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Yusuf, M. A (2014:329) kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan cara serta disajikan secara naratif. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Guwosari Tahun 2018 lebih mudah karena dalam proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan dan metode ini dapat menjelaskan secara luas penelitian tersebut agar semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi terkait Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam pengembangan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Sehingga

pembahasan yang diambil dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan perencanaan pembangunan desa.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian sebuah objek, memerlukan data-data sebanyak mungkin. Karena data yang dihimpun akan memberikan landasan dasar kekuatan dalam penelitian tersebut. Data yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

a. Data Primer

Terkait data primer ini merupakan data yang dapat didapatkan langsung dari lapangan atau lokasi tempat penelitian. Penulis menggunakan data ini untuk memperoleh informasi langsung terkait partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan Desa. Berikut data primer dalam penelitian.

Data primer menurut (Umar, 2003 : 56) adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara dan observasi (responden, informan). Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang yang dimaksud dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban responden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumen adalah bentuk catatan tentang berbagai macam kejadian atau peristiwa dimasa lampau yang memiliki makna tersendiri atau arti penting yang memiliki fungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi. (Sugiono, Metode

Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, 2010) .

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik atau cara pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan seperti dialog langsung untuk tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan (Lexy J Moleong.2009). Maksud dari diadakannya wawancara seperti itu digunakan untuk mendapatkan secara langsung objek penelitian yang terkait, namun perlu disadari bahwa teknik ini memerlukan kerjasama dan kedekatan dengan pihak narasumber, serta membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memastikan kepastian informasi yang didapatkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Arikunto, 2015), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen merupakan salah satu sumber data karena bisa dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan meramalkan. Dokumen ini digunakan untuk keperluan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2009) dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

1.9.5 Unit Analisa

Unit analisa merupakan bagian yang diteliti, dicatat dan dianggap sebagai data, sebagai bentuk dukungan informasi dan data yang pasti. Dengan dukungan mendiskripsikan hasil penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Guwosari” unit analisis pada penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa Guwosari
- b. Sekertaris Desa Guwosari
- c. Kepala Bagian Pembangunan
- d. Masyarakat Desa Guwosari

1.9.6 Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu meliputi :

Bab 1 Pendahuluan (Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat. Teori, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian)

Bab II Deskriptif Objek Penelitian

Bab III hasil Pembahasan (Pembahasan dan penelitian)

Bab IV Penutup (kesimpulan dan saran)

Daftar Pustaka